

Analisis Wacana Ekoteologi pada Website Kementerian Agama

Atiyatul Mawaddah¹, Muhamad Farhan^{2*}, Robiatul Adawiyah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

Received: 09/05/2026

Revised: 21/05/2026

Accepted: 26/05/2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi wacana ekoteologi pada website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Penelitian kualitatif ini menggunakan *documentary research* terhadap 46 postingan bertema ekoteologi yang dipublikasikan selama Januari 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada level mikrostruktural, wacana ekoteologi dibangun melalui diksi religius seperti “amanah”, “khalifah”, dan “ibadah” yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai kewajiban moral-spiritual. Pada level mesostruktural, website Kementerian Agama berfungsi sebagai media institusional dalam mendistribusikan narasi resmi pemerintah secara dominan. Sementara pada level makrostruktural, wacana ekoteologi hadir sebagai respons terhadap krisis lingkungan global sekaligus strategi legitimasi ekologis berbasis agama. Penelitian ini menegaskan bahwa ekoteologi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi strategi komunikasi institusional dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat.

Kata Kunci : Ekoteologi; Analisis Wacana Kritis; Norman Fairclough; Media Digital; Kementerian Agama Republik Indonesia.

Email

corresponding author:

farhan190888@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the construction of eco-theological discourse on the official website of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis approach. This qualitative research employed *documentary research* methods on 46 eco-theology-related posts published during January 2026. The findings reveal that at the microstructural level, eco-theological discourse is constructed through the use of religious diction such as “trust,” “caliph,” and “worship,” which position environmental preservation as a moral and spiritual obligation. At the mesostructural level, the Ministry's website functions as an institutional medium for distributing dominant official government narratives. Meanwhile, at the macrostructural level, eco-theological discourse emerges as a response to the global environmental crisis as well as a strategy for building religion-based ecological legitimacy. This study confirms that eco-theology is not merely normative religious teaching, but also serves as an institutional communication strategy in shaping public ecological awareness.

Keywords: Ecotheology; Critical Discourse Analysis; Norman Fairclough; Digital Media; Ministry of Religious Affairs of the Republic

PENDAHULUAN

Perhatian terhadap isu lingkungan dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat seiring dengan munculnya berbagai persoalan ekologis seperti deforestasi, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Laporan World Bank (2022) dan UNEP (2021) menunjukkan bahwa degradasi lingkungan di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan (United Nations Environment Programme, 2021; World Bank, 2022). Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia mulai mengintegrasikan pendekatan berbasis nilai keagamaan dalam merespons persoalan lingkungan, salah satunya melalui program ekoteologi yang ditetapkan sebagai program prioritas dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025–2029 (Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025–2029, 2025). Kebijakan ini menunjukkan bahwa isu lingkungan tidak hanya dipahami sebagai persoalan ekologis, tetapi juga dikonstruksi sebagai persoalan moral dan keagamaan.

Sebagai institusi yang berperan dalam pengelolaan kehidupan keagamaan di Indonesia, Kementerian Agama secara aktif memproduksi dan menyebarkan narasi ekoteologi melalui berbagai media digital, khususnya website resmi kementerian. Wacana tersebut hadir dalam bentuk berita, opini, publikasi kegiatan, maupun pernyataan pejabat terkait pelestarian lingkungan berbasis nilai agama. Melalui media digital, isu ekoteologi tidak hanya disampaikan sebagai informasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi komunikasi institusional dalam membangun kesadaran publik mengenai hubungan agama dan lingkungan (N. , & H. A. Couldry, 2017). Dalam konteks ini, website resmi pemerintah dapat dipahami sebagai ruang produksi wacana yang memuat kepentingan, ideologi, dan representasi tertentu.

Kajian mengenai ekoteologi sebelumnya umumnya berfokus pada aspek teologis, etika lingkungan, maupun gerakan keagamaan dalam pelestarian alam (Gottlieb, 2006; Mangunjaya, 2015; Tucker, 2017). Beberapa penelitian juga mengkaji hubungan agama dan lingkungan dalam konteks sosial Masyarakat (Aziz, 2023). Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis bagaimana ekoteologi dikonstruksi sebagai wacana institusional negara melalui media digital masih relatif terbatas. Padahal, media digital memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mereproduksi ideologi melalui praktik bahasa yang digunakan (N. Couldry, 2012). Keterbatasan tersebut menjadi celah penelitian yang penting untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam memahami bagaimana negara membangun legitimasi ekologis berbasis agama melalui media resminya.

praktik sosial yang tidak netral, melainkan sarat dengan ideologi dan kepentingan tertentu (Wodak, 2009).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumber online dengan sumber utama berasal dari website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu kemenag.go.id, serta didukung oleh berbagai literatur relevan yang berkaitan dengan ekoteologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode penelusuran dokumen (*documentary research*), dengan memfokuskan pada konten yang dipublikasikan dalam kurun waktu Januari 2026. Metode dokumentasi ini lazim digunakan dalam penelitian wacana untuk menelusuri produksi teks dalam ruang digital (Bowen, 2009).

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan sebanyak 46 postingan yang mengandung kata kunci “ekoteologi” pada website tersebut. Postingan tersebut terdiri atas berbagai bentuk konten, seperti berita nasional, berita daerah, serta artikel opini. Seluruh data kemudian diseleksi dengan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan memilih teks yang secara eksplisit memuat narasi, konsep, maupun praktik ekoteologi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama (Sugiyono, 2017). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian (Creswell, 2016).

Selanjutnya, data dianalisis dengan mengidentifikasi kata kunci dan tema-tema utama yang berkaitan dengan nilai-nilai ekoteologi, seperti hubungan manusia dengan alam, tanggung jawab ekologis berbasis keimanan, pelestarian lingkungan, serta integrasi nilai teologis dan ekologis. Dari proses identifikasi tersebut, penelitian ini mengelompokkan wacana ekoteologi ke dalam beberapa klasifikasi tematik utama, yaitu: (1) teologi lingkungan (relasi Tuhan–manusia–alam), (2) etika pelestarian lingkungan, (3) peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga alam, dan (4) praktik sosial-ekologis berbasis keagamaan. Pendekatan tematik ini digunakan untuk memahami pola representasi makna dalam teks secara sistematis (Braun, 2006).

Analisis dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga dimensi utama sesuai dengan kerangka Norman Fairclough, yaitu analisis teks (mikrostruktural), praktik wacana (mesostruktural), dan praktik sosial-budaya (makrostruktural). Pada dimensi teks, analisis difokuskan pada aspek representasi, relasi, dan identitas yang termanifestasi dalam penggunaan bahasa, seperti pemilihan diksi, metafora, dan struktur kalimat dalam wacana ekoteologi (Fairclough, 1995). Dimensi praktik wacana mencakup proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks, untuk memahami bagaimana wacana tersebut diproduksi oleh institusi Kementerian Agama serta bagaimana ia didistribusikan dan diakses oleh masyarakat. Adapun dimensi sosial-budaya mengkaji keterkaitan antara wacana ekoteologi dengan konteks sosial yang lebih luas, termasuk

krisis lingkungan global, kebijakan negara, serta dinamika sosial-keagamaan di Indonesia (Fairclough, 2010).

Dengan demikian, melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana ekoteologi tidak hanya disampaikan sebagai pesan keagamaan, tetapi juga sebagai praktik diskursif yang sarat dengan kepentingan, ideologi, dan konstruksi sosial dalam ruang digital. Pendekatan ini sekaligus memungkinkan analisis yang lebih kritis terhadap peran media institusional dalam membentuk kesadaran ekologis berbasis agama di tengah masyarakat (van Dijk, 2008).

HASIL PEMBAHASAN

Wacana Ekoteologi Kementerian Agama Republik Indonesia

No	Klasifikasi Topik	Jumlah	Contoh Representasi Wacana (Kutipan Teks/Diksi Asli)
1	Kesadaran Teologis– Ekologis	12	“Menjaga lingkungan adalah kewajiban agama”; “manusia sebagai khalifah di muka bumi”; “alam sebagai amanah suci yang harus dijaga manusia”; “merusak lingkungan menyimpang dari tujuan ibadah”; “relasi manusia dan lingkungan harus dibangun di atas prinsip amanah, tanggung jawab moral, dan keseimbangan”; “menjadi khalifah berarti mengelola bumi, bukan mengeksploitasi”; “menjaga lingkungan bagian dari iman dan ibadah”; “merusak alam berarti mengabaikan pesan Tuhan yang hadir dalam ciptaan-Nya.”
2	Implementasi Program & Aksi Nyata	16	“Gerakan Ekoteologi Lintas Agama”; program “Pohon Samawa” bagi pengantin usai akad; pembangunan “bioswale sebagai infrastruktur hijau berbasis nilai keagamaan”; “Panen ikan lele melalui Program Ekoteologi Madrasah”; “wakaf hutan dan sumur”; “#PilahItulbadah”; “ramah lingkungan harus tertulis di spesifikasi dan terbaca di evaluasi”; penanaman “lebih dari 5.000 bibit pohon produktif”; “pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkelanjutan”; aksi “satu juta pohon matao.”
3	Integrasi	10	“Kurikulum Berbasis Cinta”; “panca cinta: cinta kepada

	Pendidikan & Kelembagaan		Tuhan, sesama manusia, bangsa dan negara, ilmu pengetahuan, serta lingkungan”; “integrasi nilai ekoteologi ke dalam kurikulum pendidikan”; “penguatan moderasi beragama, kepemimpinan, ekoteologi, hingga layanan keagamaan berdampak”; program “Green Campus sebagai wujud nyata ekoteologi”; “sentra ekoteologi” sebagai “laboratorium kesadaran”; “fiqih lingkungan” dan “tafsir tematik ekologi”; “pelatihan ASN dan penyuluh agama”; “penguatan riset internasional dan kolaborasi dengan dunia industri.”
4	Wacana Publik & Global	8	“Seminar internasional tentang ekoteologi” di Universitas Al-Azhar; Indonesia dianggap “paling representatif untuk bicara ekoteologi”; kolaborasi dengan “TVRI” untuk edukasi moderasi beragama dan ekoteologi; “Talkshow Ekoteologi Pemuda Lintas Iman”; “forum lintas agama di Vatikan”; “membangun dialog langsung dengan audiens internasional”; “pendekatan keagamaan dalam pelestarian lingkungan”; “harmoni alam dan manusia.”
	Total	46	

Tabel 1. Topik dalam wacana ekoteologi Kementerian Agama RI Januari 2026

Secara keseluruhan, wacana ekoteologi yang dipublikasikan melalui website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia selama Januari 2026 menunjukkan intensitas produksi wacana yang tinggi. Dari hasil penelusuran ditemukan 46 berita, opini, dan laporan kegiatan yang secara eksplisit menggunakan istilah “ekoteologi” atau memuat narasi hubungan agama dan lingkungan. Tingginya frekuensi publikasi tersebut menunjukkan adanya upaya institusional dalam membangun serta menyebarkan narasi ekologis berbasis agama melalui media digital negara (Fairclough, 1995; van Dijk, 2008).

Berdasarkan analisis isi teks, wacana ekoteologi dapat diklasifikasikan ke dalam empat topik utama, yaitu: (1) kesadaran teologis-ekologis, (2) implementasi program dan aksi nyata, (3) integrasi pendidikan dan kelembagaan, serta (4) wacana publik dan global. Keempat klasifikasi tersebut tampak tidak hanya menghadirkan ekoteologi sebagai ajaran normatif keagamaan,

tetapi juga sebagai perangkat diskursif yang menghubungkan isu lingkungan dengan agenda kelembagaan negara.

Pada kategori kesadaran teologis-ekologis, teks banyak menggunakan diksi religius untuk membangun legitimasi moral atas isu lingkungan. Misalnya dalam pidato Sekjen Kemenag disebutkan bahwa “pengembangan kerukunan diarahkan pada fase lanjutan, yaitu kerukunan antara manusia, alam, dan Tuhan.” Pada berita lain ditegaskan bahwa “menjaga lingkungan adalah kewajiban agama” dan manusia diposisikan sebagai “khalifah di muka bumi”. Dalam pidato Menteri Agama di Universitas Al-Azhar Kairo bahkan dinyatakan bahwa “merusak lingkungan menyimpang dari tujuan ibadah.” Potongan-potongan teks tersebut menunjukkan bagaimana isu ekologis dikonstruksi melalui bahasa teologis yang menghubungkan relasi manusia dengan alam sebagai amanah spiritual.

Selain itu, beberapa teks secara eksplisit mbingkai alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Pada artikel Hari Raya Penampakan Tuhan disebutkan bahwa “merusak alam berarti mengabaikan pesan Tuhan yang hadir dalam ciptaan-Nya.” Sementara dalam khutbah bertema ekoteologi dinyatakan bahwa “menjadi khalifah berarti mengelola bumi, bukan mengeksploitasi.” Pilihan diksi seperti “amanah”, “rahmah”, “ibadah”, “cinta lingkungan”, dan “harmoni semesta” memperlihatkan strategi bahasa yang memadukan pesan ekologis dengan legitimasi religius.

Topik implementasi program dan aksi nyata menjadi kategori yang paling dominan. Berbagai berita menampilkan tindakan konkret seperti penanaman pohon lintas agama, program pohon pengantin di KUA, pembangunan bioswale di kampus, green campus, panen ikan lele berbasis madrasah, hingga gerakan #PilahItulbadah. Dalam berita Aksi Iklim, Pengantin Usai Akad Tanam Pohon di Halaman KUA disebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan “implementasi Gerakan Ekoteologi Lintas Agama Kementerian Agama.” Pada berita lain dijelaskan bahwa program pengadaan barang dan jasa berkelanjutan merupakan bentuk “ekoteologi yang paling nyata”. Bahkan terdapat anjuran teknis seperti “kurangi barang sekali pakai”, “pilih produk yang mengurangi limbah”, dan “gunakan spesifikasi yang menghemat air/listrik”.

Narasi implementatif juga tampak dalam pemberitaan pendidikan berbasis lingkungan. Berita tentang MIN 1 Dairi menyebut bahwa panen ikan lele dilakukan sebagai “sarana belajar pengelolaan lingkungan secara langsung.” Pada berita UIN SATU Tulungagung, pembangunan bioswale diposisikan sebagai “infrastruktur hijau berbasis nilai keagamaan.” Penggunaan contoh-contoh praktis tersebut menunjukkan bahwa wacana ekoteologi dibangun bukan hanya

melalui konsep abstrak, tetapi melalui representasi aktivitas konkret yang mudah divisualisasikan publik.

Pada kategori integrasi pendidikan dan kelembagaan, wacana ekoteologi direpresentasikan sebagai bagian dari transformasi institusi pendidikan keagamaan. Dalam artikel Transformasi Keberagamaan: dari Kerukunan menuju Peradaban Cinta disebutkan bahwa di madrasah “digagas kurikulum berbasis cinta yang diharapkan melahirkan panca cinta: cinta kepada Tuhan, sesama manusia, bangsa dan negara, ilmu pengetahuan, serta lingkungan.” Sementara itu, berita mengenai PTKIN menekankan pentingnya integrasi “fiqih lingkungan”, “tafsir tematik ekologi”, dan program “green campus”. Dalam artikel Melihat UI Greenmetric dan Kontribusi PTKIN dalam Program Keberlanjutan bahkan dikritik bahwa “banyak PTKIN masih memandang keberlanjutan sebagai isu tambahan, bukan bagian inti dari pendidikan Islam.”

Beberapa berita juga memperlihatkan bagaimana ekoteologi dijadikan bagian dari pengembangan kapasitas kelembagaan. Misalnya pelatihan ASN yang mencakup “penguatan moderasi beragama, kepemimpinan, ekoteologi, hingga layanan keagamaan berdampak”, serta pengembangan “sentra ekoteologi” di perguruan tinggi Buddha. Dalam pemberitaan STABN Wonogiri disebutkan bahwa sentra tersebut diharapkan menjadi “laboratorium kesadaran” agar civitas akademika “mempraktikkan etika terhadap bumi (eco-ethics).”

Pada kategori wacana publik dan global, teks menunjukkan upaya membawa isu ekoteologi ke ruang diplomasi internasional dan media publik. Dalam berita keberangkatan Menteri Agama ke Mesir disebutkan bahwa Indonesia dianggap “paling representatif untuk bicara ekoteologi saat ini.” Pada seminar internasional di Al-Azhar, Menag menyampaikan bahwa “relasi manusia dan lingkungan harus dibangun di atas prinsip amanah, tanggung jawab moral, dan keseimbangan.” Selain itu, kerja sama dengan TVRI diarahkan untuk “mengemas program-program teknis Kementerian Agama agar lebih mudah diakses dan dipahami masyarakat luas melalui kanal televisi nasional.”

Dengan demikian, pola pemberitaan menunjukkan bahwa website institusional tidak hanya menyampaikan informasi kegiatan, tetapi secara aktif membangun konstruksi simbolik mengenai relasi agama dan lingkungan. Repetisi istilah seperti “kewajiban agama”, “amanah”, “khalifah”, “cinta lingkungan”, dan “tanggung jawab iman” memperlihatkan adanya konsistensi framing dalam membentuk ekoteologi sebagai diskursus resmi institusi.

Analisis Mikrostruktural

Pada level mikrostruktural, wacana ekoteologi dibangun melalui pilihan diksi religius, struktur kalimat persuasif, serta penggunaan metafora moral-keagamaan. Pilihan kata seperti

“amanah”, “khalifah”, “rahmah”, “ibadah”, “harmoni”, dan “cinta lingkungan” muncul secara berulang dalam berbagai teks. Dalam perspektif analisis wacana kritis, penggunaan diksi tersebut bukan sekadar pilihan linguistik, tetapi strategi ideologis untuk membingkai isu lingkungan sebagai bagian dari kewajiban keagamaan (Fairclough, 1995).

Misalnya, pada pidato Menteri Agama di Al-Azhar disebutkan bahwa “merusak lingkungan menyimpang dari tujuan ibadah.” Kalimat ini menghubungkan tindakan ekologis dengan validitas praktik keberagamaan. Dengan demikian, kerusakan lingkungan tidak hanya direpresentasikan sebagai persoalan sosial atau ekologis, tetapi juga penyimpangan spiritual.

Istilah “khalifah” juga digunakan secara konsisten untuk membangun identitas ekologis manusia. Dalam khutbah Jumat bertema ekoteologi disebutkan bahwa “menjadi khalifah berarti mengelola bumi, bukan mengeksploitasi.” Sementara dalam pidato pejabat Kemenag dinyatakan bahwa manusia memiliki “tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi.” Pengulangan istilah tersebut memperlihatkan konstruksi relasi manusia-alam yang ditempatkan dalam kerangka moral-teologis.

Selain itu, terdapat penggunaan ungkapan eufemistis seperti “merawat bumi”, “harmoni semesta”, “cinta lingkungan”, dan “menjaga alam sebagai wujud iman.” Pada teks Buddhis misalnya disebutkan bahwa “dengan hidup sederhana, kita memberikan ruang bagi bumi untuk bernapas.” Pilihan metafora tersebut memperhalus pesan ekologis sehingga tampak lebih persuasif dan emosional bagi pembaca religius.

Dari sisi struktur kalimat, teks didominasi bentuk deklaratif dan ajakan moral. Kalimat seperti “penyuluh agama harus tampil sebagai teladan”, “menjaga lingkungan adalah kewajiban agama”, atau “alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang suci dan wajib dijaga” menunjukkan pola bahasa normatif yang mengarahkan pembaca pada cara pandang tertentu. Struktur semacam ini memperlihatkan bahwa teks tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berupaya membentuk orientasi moral pembaca.

Analisis juga menunjukkan bahwa sebagian besar teks bersifat afirmatif terhadap program institusi. Narasi mengenai ekoteologi hampir selalu dikaitkan dengan keberhasilan, penguatan, atau implementasi kebijakan tanpa menghadirkan kritik mendalam terhadap efektivitas program. Bahkan pada artikel yang relatif reflektif seperti *Peduli Lingkungan, tetapi Mengapa Perilaku Kita Tertinggal?*, kritik tetap diarahkan pada pertanyaan implementasi, bukan pada kerangka kebijakan itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa media institusional lebih dominan berfungsi sebagai ruang reproduksi narasi organisasi dibanding arena dialog yang menghadirkan perspektif beragam (van Dijk, 2008).

Analisis Mesostruktural

Pada level mesostruktural, website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia berfungsi sebagai medium produksi, distribusi, dan reproduksi wacana ekoteologi. Dalam perspektif Fairclough (1995), media institusional tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga perangkat kontrol terhadap narasi yang beredar di ruang publik.

Dari sisi produksi teks, mayoritas berita berasal dari internal institusi, seperti pidato pejabat, laporan kegiatan, pernyataan kementerian, dan opini ASN atau akademisi yang memiliki keterkaitan dengan program Kementerian Agama. Pola ini menghasilkan kecenderungan narasi yang homogen dan selaras dengan agenda kelembagaan. Misalnya, berbagai berita secara konsisten menyebut ekoteologi sebagai bagian dari “Asta Protas Menteri Agama”, “program prioritas”, atau “wujud nyata moderasi beragama”.

Dalam proses distribusi, media digital digunakan untuk memperluas jangkauan wacana kepada masyarakat luas. Publikasi dilakukan hampir setiap hari dengan format berita ringan, opini, khutbah, hingga laporan kegiatan daerah. Intensitas distribusi yang tinggi menunjukkan adanya strategi komunikasi institusional untuk membangun visibilitas isu ekoteologi di ruang publik digital.

Dari sisi konsumsi teks, masyarakat diposisikan terutama sebagai penerima narasi resmi institusi. Teks-teks yang dipublikasikan cenderung satu arah dan minim ruang dialog. Hampir tidak ditemukan perspektif yang mempertanyakan efektivitas program, konflik kepentingan, maupun tantangan implementasi di lapangan. Bahkan kritik yang muncul tetap berada dalam batas wacana internal institusi, seperti pada artikel yang mempertanyakan “sejauh mana seluruh upaya itu benar-benar terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.”

Ketiadaan perspektif tandingan menunjukkan bahwa website institusional lebih berfungsi sebagai medium afirmasi kebijakan dibanding arena diskusi publik yang terbuka. Dalam konteks analisis wacana kritis, pola ini memperlihatkan relasi kuasa yang bersifat top-down, di mana institusi memiliki otoritas dominan dalam menentukan definisi, arah, dan representasi makna ekoteologi (van Dijk, 2008).

Analisis Makrostruktural

Pada level makrostruktural, kemunculan wacana ekoteologi berkaitan erat dengan konteks sosial yang lebih luas, terutama meningkatnya perhatian global terhadap krisis lingkungan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Penetapan ekoteologi sebagai bagian dari program prioritas Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor

244 Tahun 2025 menunjukkan adanya respons institusional terhadap isu ekologis yang semakin menguat dalam ruang nasional maupun global.

Dalam berbagai teks, krisis lingkungan direpresentasikan sebagai akibat perilaku manusia yang eksploitatif. Pada khutbah Jumat disebutkan adanya “banjir, kekeringan, krisis air bersih, dan rusaknya hutan”, sedangkan dalam artikel lain dinyatakan bahwa “kerusakan di darat dan laut akibat ulah manusia.” Representasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekologis dikonstruksi bukan hanya sebagai krisis teknis, tetapi juga krisis moral.

Pendekatan solusi yang ditawarkan cenderung berbasis spiritual dan etis. Dalam berbagai teks disebutkan bahwa menjaga lingkungan merupakan “wujud tanggung jawab iman”, “amanah suci”, atau bagian dari “tujuan ibadah.” Dengan demikian, agama diposisikan sebagai sumber legitimasi moral untuk membangun kesadaran ekologis masyarakat.

Pada konteks global, keterlibatan Menteri Agama dalam seminar internasional di Al-Azhar serta forum lintas agama di Mesir dan Vatikan memperlihatkan adanya upaya membawa ekoteologi Indonesia ke panggung internasional. Pernyataan bahwa Indonesia dianggap “paling representatif untuk bicara ekoteologi” menunjukkan konstruksi identitas simbolik negara sebagai aktor yang menawarkan pendekatan keagamaan terhadap isu keberlanjutan global.

Melalui perspektif analisis wacana kritis, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa wacana ekoteologi tidak berada dalam ruang netral. Media digital institusional berfungsi sebagai instrumen strategis dalam membentuk, mereproduksi, dan melegitimasi hubungan antara agama, lingkungan, dan identitas nasional. Dengan kata lain, ekoteologi tidak hanya hadir sebagai narasi keagamaan, tetapi juga sebagai praktik diskursif yang mendukung pembentukan legitimasi simbolik negara dalam isu ekologis kontemporer (Fairclough, 2010; van Dijk, 2008).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap 46 teks ekoteologi pada website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia periode Januari 2026, penelitian ini menunjukkan bahwa ekoteologi dikonstruksi sebagai wacana institusional yang menghubungkan isu lingkungan dengan nilai-nilai keagamaan. Pada level teks, hal ini terlihat melalui penggunaan diksi religius seperti “amanah”, “khalifah”, dan “ibadah” untuk membingkai pelestarian lingkungan sebagai kewajiban moral-spiritual. Pada level praktik wacana, website Kementerian Agama berfungsi sebagai media penyebaran narasi resmi pemerintah yang dominan. Sementara pada level sosial-budaya, wacana ekoteologi hadir sebagai respons terhadap krisis lingkungan sekaligus upaya membangun legitimasi ekologis berbasis agama. Penelitian ini menegaskan

bahwa ekoteologi tidak hanya menjadi ajaran normatif keagamaan, tetapi juga strategi komunikasi institusional dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat, meskipun ruang dialog kritis dan partisipasi publik masih terbatas.

DAFTAR REFERNSI

- Aziz, A. (2023). *Agama dan krisis lingkungan: Perspektif ekoteologi dalam masyarakat kontemporer*. LKiS.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. . *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Braun, V. , & C. V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Couldry, N. (2012). *Media, society, world: Social theory and digital media practice*. Polity Press.
- Couldry, N. , & H. A. (2017). *The mediated construction of reality*. Polity Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (4th ed.)* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Fairclough, N. (1995). *Media discourse*. Edward Arnold.
- Fairclough, N. (2010). *Critical discourse analysis: The critical study of language (2nd ed.)* (2nd ed.). Routledge.
- Gottlieb, R. S. (2006). *A greener faith: Religious environmentalism and our planet's future*. Oxford University Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Ekoteologi: Mengamalkan iman melestarikan lingkungan*. Kementerian Agama RI.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2025 Tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025–2029, Kementerian Agama RI (2025).
- Mangunjaya, F. M. (2015). *Konservasi alam dalam Islam*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tucker, M. E. , & G. J. (2017). *Ecology and religion*. Island Press.
- United Nations Environment Programme. (2021). *Making peace with nature: A scientific blueprint to tackle the climate, biodiversity and pollution emergencies*.
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. Palgrave Macmillan.
- Wodak, R. , & M. M. (2009). *Methods of critical discourse analysis (2nd ed.)*. Sage Publications.
- World Bank. (2022). *World development report 2022: Finance for an equitable recovery*.